

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan tesis ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang topik kolaborasi dalam pengelolaan sampah, diantaranya oleh

Michael Daka dan Clever Madimutsa (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dengan semakin maju dan berkembangnya ekonomi dunia maka sangat perlunya sebuah kolaborasi antar stakeholders dalam rangka pengelolaan sampah. Kolaborasi yang dilakukan adalah dengan melibatkan pemerintah lokal, pelaku usaha dan masyarakat.

Ivan Dhimas, Sri Hastjarjo, dan Yulius Slamet (2022) menyatakan bahwa kolaborasi antar stakeholder dapat dilakukan dalam rangka pembangunan fasilitas dan juga penyusunan kebijakan publik. Dalam prosesnya kolaborasi ini dihasilkan melalui proses komunikasi yang memunculkan kesepahaman bersama selama dilaksanakannya proses kolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang terintegrasi. Dalam penelitian ini juga dinyatakan bahwa *collaborative governances* akan selalu mampu dan efektif dalam rangka mengimplementasikan penyusunan kebijakan publik.

Jati Puspita Rini, Ely Sufianti, dan Sait Abdullah (2020) yang membahas tentang topik serupa dalam penelitiannya, menjelaskan bahwa permasalahan sampah tidak akan mampu diselesaikan jika hanya mengandalkan pemerintah tanpa melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya sebagai sumber dari timbulan sampah tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka membangun sistem pengelolaan sampah perlu diterapkan sebuah manajemen yang kolaboratif dari tingkat sumber, tingkat kawasan, maupun tingkat daerah secara menyeluruh.

Adelia Dwinta Amelinda (2020) menjelaskan dalam penelitian yang lebih teknis, bahwa dalam tingkat teknis seperti di TPST Tambakrejo sebagai fasilitas pengelolaan sampah di tingkat desa atau kelurahan bahwa kolaborasi sangat

menentukan berjalannya fasilitas pengelolaan sampah, utamanya antara pekerja kebersihan, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat.

Mochamad dan Rozikin (2019) menjelaskan kolaborasi terjadi melalui serangkaian proses yaitu diawali dengan dialog antar muka, membangun kepercayaan, membangun komitmen tiap aktor, pemahaman bersama, dan menghasilkan hasil jangka pendek. Hal ini juga menguatkan teori proses kolaborasi yang dicetuskan oleh Ansell dan Gash (2008.)

Diperkuat oleh Maulana Mukhlis dan Syarif Makhya (2020) menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah kolaborasi dapat tercipta dikarenakan dua hal utama sebagai syarat awal, pertama adalah kepercayaan dari satu actor kepada aktor lainnya dan terpenuhinya aspek kewenangan yang dipegang oleh pemerintah sebagai pihak inisiator kolaborasi. Selain itu keberhasilan sebuah kolaborasi juga dipengaruhi oleh faktor kondisi awal, desain institusi, serta fasilitasi kepemimpinan.

Menurut Tyas Ayu Puspita, dan Calvin Edo Wahyudi (2023) menerangkan bahwa keberhasilan sebuah proses *collaborative governance* yang dilakukan dapat dinilai melalui kesesuaian dengan indikator yang dicetuskan oleh Goldsmith dan Kettl antara lain: *Network Structure; Commitment to a Common Purpose; Trust Among the Participants; Governance; Access to Authority; dan Distributive Accountability/ Responsibility*.

Sedangkan mengenai stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi menurut Kiki Sudiana, Erni Tisnawati Sule, Imas Soemaryani, dan Yunizar (2020) mendefinisikan stakeholder dalam sebuah kerangka *pentahelix* terdiri atas 5 pihak yaitu akademis (*academician*), sektor usaha (*business*), pemerintah (*government*), masyarakat (*community*), dan media massa (*media*).

Menurut Sinta Diah Kusuma, Herbasuki Nurcahyanto, dan Aufaril Marom (2022), menerangkan bahwa dalam rangka menganalisis peran dari stakeholder yang dilakukan pertama kali adalah melakukan identifikasi stakeholders disesuaikan dengan kerangka *penta helix* itu sendiri. Selanjutnya adalah melakukan

pemetaan untuk mengetahui peran, kepentingan, dan pengaruh masing-masing stakeholder.

Ebru Serucu balci dan Ocan Tuna (2022) dalam tulisannya, menerangkan bahwa dalam sebuah aktivitas yang kompleks terlibat banyak stakeholder yang tidak mungkin memiliki tingkat kontribusi peran yang merata. Terdapat stakeholder yang memiliki peran sangat signifikan ataupun sebaliknya. Dalam memetakan peran tersebut dilakukan klasifikasi menurut *saliency level*. Dengan mengidentifikasi hal tersebut diharapkan dalam menentukan strategi kolaborasi yang optimal.

2.2 Collaborative Governance

2.2.1 Konsep Dasar Governance

Menurut Dwiyanto (2018), *governance* lebih mendefinisikan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses-proses pembentukan kebijakan publik, yang saat ini sudah berkembang dan semakin kompleks. Istilah *governance* secara umum merujuk pada cara pemerintahan dijalankan, tidak hanya oleh negara atau institusi pemerintah, tetapi juga melibatkan aktor non-negara seperti sektor swasta dan masyarakat sipil. Berdasarkan hal tersebut istilah *governance* tidak dapat disamakan artinya dengan *government*. *Governance* mencakup proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang berlangsung dalam suatu sistem sosial, baik formal maupun informal. *Governance* juga dapat merujuk mengenai perubahan tata kelola pemerintahan yang memiliki makna yang lebih luas seperti proses baru dalam pemerintahan, perubahan kondisi dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ada, dan/atau metode yang baru dalam memerintah sebuah masyarakat (Rhodes, 2017). Salah satu definisi klasik diberikan oleh Rhodes (1996), yang menyatakan bahwa:

"Governance is self-organizing, interorganizational networks characterized by interdependence, resource exchange, rules of the game, and significant autonomy from the state."

Rhodes menekankan pentingnya jaringan antar organisasi yang bekerja otonom namun tetap saling tergantung, konsep ini cocok untuk menganalisis peran

multi aktor dalam pengelolaan isu-isu publik seperti persampahan, dimana pemerintah tidak selalu menjadi aktor dominan tunggal.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah disampaikan, dapat dikatakan bahwa *governance* merupakan perubahan ataupun peralihan dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang tidak hanya berpusat pada pemerintah, namun juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi (Dwiyanto, 2018).

Berkembang dari paradigma *governance*, *collaborative governance* muncul sebagai model yang menekankan kerja sama lintas sektor secara formal dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Emerson et al. (2012) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai:

“The processes and structures of public policy decision making and management that engage people constructively across the boundaries of public agencies, levels of government, and/or the public, private and civic spheres to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished.”

Kerangka Emerson lebih komprehensif dan integratif dibanding pendekatan sebelumnya, karena mencakup dimensi sistem, dinamika kolaborasi, dan kapasitas kolaboratif yang dibutuhkan dalam tata kelola isu kompleks.

Adapun *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008) didefinisikan sebagai tata cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung stakeholders di luar pemerintahan. *Collaborative governance* berorientasi pada konsensus bersama atau musyawarah dalam proses pengambilan keputusan hubungannya dengan pelaksanaan sebuah kebijakan publik atau program.

Konsep kolaborasi menguat sebagai respon terhadap arti kolaborasi yang tersemat pada istilah *collaborative governance* merupakan fundamental yang terletak pada pengelolaan jaringan. Jaringan yang dimaksud adalah hubungan komunikasi antara pemangku kepentingan, sehingga dapat disimpulkan bahwa teori kolaborasi merupakan analisis dari proses tata kelola dengan sudut pandangan jaringan sosial. Pada implementasinya setiap pemangku kepentingan yang terlibat

diharuskan terlibat dalam dialog, dimana pemangku kepentingan tersebut merepresentasikan diri mereka sendiri (Booher dan Innes, 2002).

Menurut Agrawal dan Lemos dalam Subarsono (2011) mengartikan bahwa *collaborative governance* tidak hanya terbatas pada pemangku kepentingan yang terdiri atas pemerintah dan nonpemerintah tetapi juga terbentuk karena adanya *multipartner governance* yang terdiri atas sektor swasta, masyarakat, dan komunitas. *Collaborative governance* juga terbangun di atas sinergitas pemangku kepentingan seperti halnya kerjasama *public-private-social*.

Menurut Ballogh dkk pada Subarsono (2011) mengartikan bahwa *collaborative governance* sebagai proses dan struktur dalam pengelolaan dan perumusan kebijakan publik dengan melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai tingkatan, baik dari dalam instansi pemerintahan, instansi swasta, dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bersama yang tidak dapat diwujudkan apabila hanya dilaksanakan oleh satu pihak saja.

2.2.2 Model Kolaborasi

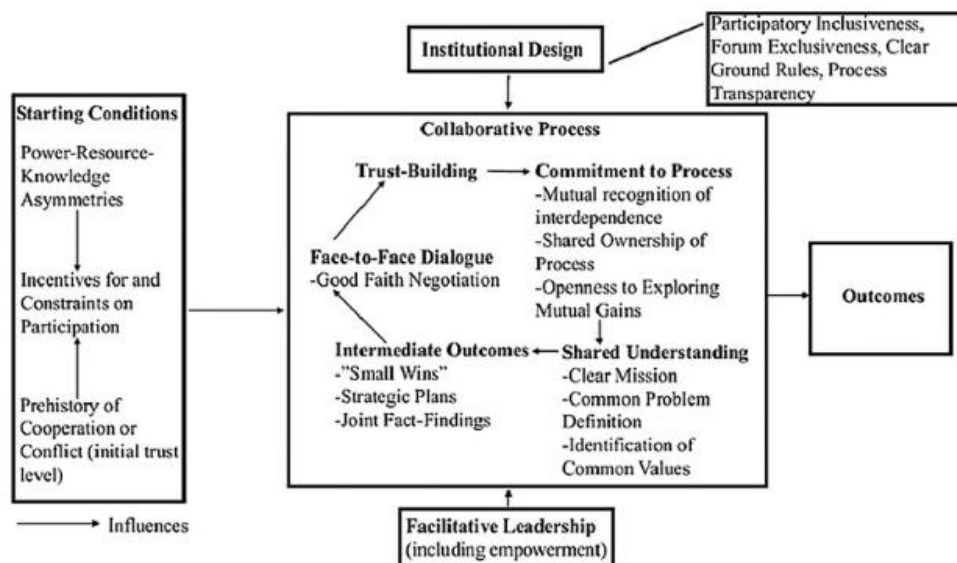
Menurut Ansell dan Gash (2008), masalah publik yang kompleks mendorong terjadinya kolaborasi, misalnya seperti terjadi bencana yang mempengaruhi stabilitas sosial ekonomi suatu wilayah merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan tindakan bersama dari berbagai pihak terkait permasalahan bencana. Upaya ini disebabkan oleh inisiatif untuk menangani berbagai masalah yang sedang dihadapi publik, dimana ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak terjadi secara spontan dan ada yang mendasari timbulnya perilaku tersebut seperti adanya masalah yang berdampak pada multi-sektor dan penyelesaiannya membutuhkan keterlibatan bersama (Hudson dan Hardy dalam Everingham, 2012:177)

Kemunculan *collaborative governance*, baik itu secara adaptif atau terencana berkaitan dengan alasan-alasan berikut (Ansell & Gash, 2008):

- a. Kompleksitas serta saling interdependensi antar lembaga.
- b. Konflik pada kelompok yang berkepentingan secara laten dan sulit diredam.
- c. Upaya menemukan alternatif baru pada pencapaian legitimasi politik.

Penggunaan sebuah model dapat dijadikan sebagai acuan dasar kolaborasi secara sistematis. Dalam penggunaan suatu model yang relevan pada kolaborasi perlu ditunjang dengan adanya pengetahuan yang luas dan terbuka, sehingga dalam memilih dan menentukan model, peneliti harus mengetahui kesesuaian model yang dirancang dengan dasar dari pada model itu sendiri. Pada saat yang sama, hal ini juga dapat memberikan gambaran mengenai relevansi program yang dilaksanakan dan model yang ada jika dikaitkan dengan bukti empiris yang ditemukan peneliti di bidang ini.

Berdasarkan hal tersebut, Ansell dan Gash (2008) mengembangkan model kolaborasi melalui meta-analisis terhadap 137 studi kasus di berbagai bidang pengetahuan kebijakan, memunculkan model kolaborasi yang terdiri dari 4 (empat) variabel yakni kondisi awal (*starting conditions*), desain kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan (*leadership*), serta proses kolaboratif (*collaborative process*). Berikut merupakan model kolaborasi yang digunakan Ansell dan Gash:



Gambar 2. 1 Model Collaborative Governance

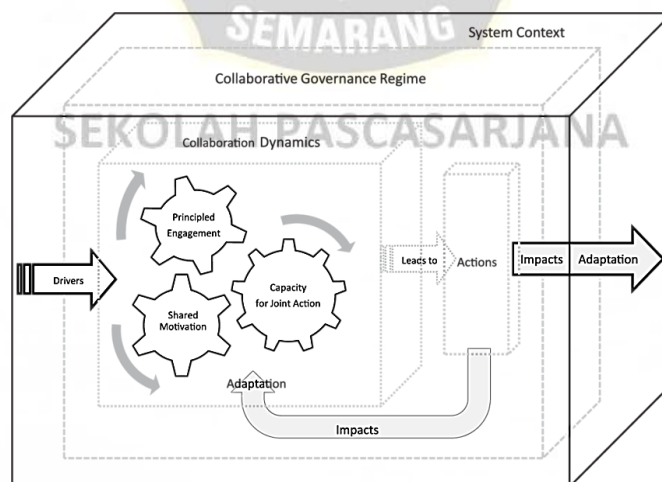
Sumber: Ansell dan Gash (2008)

Dalam model *collaborative governance* yang diuraikan Ansell dan Gash (2008), terdapat 5 bagian penting dan saling terhubung satu sama lain. Kelima bagian yang dimaksud adalah kondisi awal (*starting condition*), proses kolaboratif

(*collaborative process*), desain kelembagaan (*institutional design*), pengelolaan fasilitas (*facilitative leadership*), dan tahap terakhir adalah hasil (*outcome*).

Cakupan kondisi awal berdampak besar pada proses kolaborasi. Kondisi-kondisi tersebut mewakili keadaan awal yang mengarahkan pada proses kolaboratif. Unsur yang termasuk dalam kondisi awal atau *starting conditions* antara lain sumber daya, pengetahuan, dan partisipasi. Disisi lain, dalam desain kelembagaan atau *institutional design* juga menjadi bagian yang menentukan berhasil tidaknya proses kolaborasi. Beberapa elemen dari proses kolaborasi atau *collaborative process* mencakup dialog tatap muka, pengembangan kepercayaan, kesepahaman bersama, komitmen untuk berproses, dan *intermediate outcomes*. Setiap bagian dari model *collaborative governance* saling terhubung dan memiliki dampak signifikan terhadap proses kolaborasi, siapapun dapat menentukan apakah hasil akhir dari suatu kolaborasi baik atau tidak.

Selain Ansell dan Gash, Emerson et al., (2012) meninjau literatur yang ada dan mengusulkan model kolaborasi yang mempertimbangkan beberapa dimensi: *system context*, *collaborative governance regime (CGR)* dan *collaboration dynamics*. Dimensi yang relevan ditunjukkan pada Gambar 2.2 berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Integratif Collaborative Governance

Sumber: Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012)

Kotak terluar menunjukkan *system context* yang ditandai dengan garis-garis padat, disekitarnya meliputi politik, sosial ekonomi, serta lingkungan yang

mempengaruhi atau dipengaruhi *collaborative governance regime (CGR)*. *System context* menghasilkan peluang atau kendala sehingga mempengaruhi *collaboration dynamics* (dinamika kolaborasi) sejak dari awal hingga berjalannya waktu. Bertolak pada *system context* ini kemudian memunculkan *drivers* dan unsur-unsur yang mencakup kepemimpinan, insentif konsekuensial, interdependensi serta ketidakpastian.

Sebagai model, kolaborasi yang dijelaskan oleh Ansell & Gash (2008) dan Emerson, et al. (2012) berupaya menghubungkan keterlibatan setiap pemangku kepentingan dalam konteks berbeda terkait isu kompleks. Lebih jauh lagi, model kolaborasi yang dijelaskan mendorong pertukaran sumber daya yang langka, penyamaan strategi dan tujuan bersama dari berbagai pemangku kepentingan untuk memecahkan masalah sosial yang ada.

2.2.3 Proses Kolaborasi

O'Leary dan Vij dalam Rahayu (2020) menyampaikan bahwa kolaborasi mengacu pada proses memfasilitasi dan mengoperasikan permasalahan publik yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan untuk diselesaikan bersama. Kolaborasi dapat mendorong kerjasama dalam mencapai tujuan bersama, namun mengorbankan independensi dalam hubungan multi aktor dan multi sektor, sehingga upaya dalam kerjasama ini menunjukkan adanya keterkaitan antar pihak yang terlibat dalam proses kerjasama tersebut.

Proses kolaborasi adalah proses dimana ditemukan dialog yang melibatkan berbagai aktor dan pada akhirnya menghasilkan keputusan berdasarkan konsensus (Islamy, 2018: 51-52). Proses kolaborasi memperlihatkan bahwa kolaborasi tidak terbangun secara instan tetapi timbul dari interaksi antar organisasi dalam bentuk formal dan informal yang didasari pada rangkaian berulang dari negosiasi, membangun komitmen, serta pelaksanaan komitmen (Sabaruddin, 2015:31).

Jika dicermati, proses kolaborasi terkadang terlihat sebagai serangkaian perkembangan tahapan-tahapan. Ansell dan Gash (2008), mengemukakan dimana proses pembangunan konsensus diidentifikasi, yaitu dimulai dengan tahap pra negosiasi, tahap negosiasi, dan tahap pelaksanaan. Demikian pula, Gray (1990)

mengemukakan bahwa proses kolaborasi terdiri dari tahap penentuan masalah; tahap penentuan tujuan; dan diakhiri dengan tahap pelaksanaan.

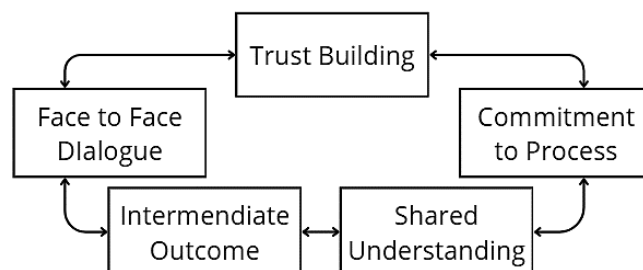
Berdasarkan studi yang dilakukan, berkembang pula berbagai studi tentang proses kolaborasi. Secara spesifik dapat diamati pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Proses Kolaborasi

<i>Bryson, Crosby, and Stone (2006),</i>	<i>Ansell and Gash (2008)</i>	<i>Agranoff (2007, 2012)</i>	<i>Bryson, Crosby and Stone (2015)</i>
<i>Agreement</i>	<i>Face to face dialogue</i>	<i>Activation</i>	<i>Communication mechanisms</i>
<i>Legitimacy</i>	<i>Trust building</i>	<i>Framing</i>	<i>Trust and commitment</i>
<i>Trust</i>	<i>Commitment to process</i>	<i>Mobilizing</i>	<i>Legitimacy</i>
<i>Conflict Management</i>	<i>Shared understanding</i>	<i>Synthesizing</i>	<i>Shared understanding</i>
<i>Planning</i>	<i>Intermediate outcomes</i>		<i>Formal and emergent planning</i>

Sumber: Bryson, Crosby, dan Stone (2006), Ansell dan Gash (2008), Agranoff (2007, 2012), Bryson, Crosby dan Stone (2015) dalam Aksan (2022)

Bertolak dari beberapa tahapan membangun proses kolaborasi (Ansell dan Gash, 2008) yang didasari pada kajian 137 studi kasus yang berkaitan dengan kolaboratif telah memunculkan proses kolaborasi yang bersifat siklus bukan linear (Rahayu et al., 2020:144; Sabaruddin, 2015:31), dimana aspek komunikasi merupakan kunci pada kolaborasi yang diawali dari tahap *face-to-face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding* dan *intermediate outcomes*.



Gambar 2. 3 Proses Kolaborasi

Sumber: Ansell dan Gash (2008), diolah oleh Penyusun (2024)

Berikut merupakan tahap yang merupakan fase proses kolaborasi yang diungkapkan oleh Ansell dan Gash (2008):

a. *Face to Face Dialogue*

Face to face dialogue merupakan suatu bentuk komunikasi. *Collaborative governance* tidak akan pernah terlepas dari aspek komunikasi karena terdapat proses antara dua orang atau lebih melakukan pertukaran informasi dan data, sehingga satu sama lain terbangun sebuah pengertian yang sama (Rogers dan Kincard dalam Sule dan Priansa, 2018; 264). *Face to face dialogue* ini dibangun untuk mengarahkan pada konsensus, dimana diperlukan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang, kepentingan, dan keuntungan bersama.

Dialog tatap muka juga dapat mengubah stereotip yang ada, ketidakpercayaan antar pemangku kepentingan dan meminimalisir hambatan komunikasi lainnya (Bentrup, dalam Ansell dan Gash, 2008). Dialog tatap muka merupakan hal utama dan penting karena dapat membangun kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama dalam proses kolaborasi (Plummer dan Fitzgibbon, 2004).

b. *Trust Building*

Tahap kedua yang dapat dilakukan sebagai modal dasar *collaborative governance* adalah membangun kepercayaan. Fase ini mempertegas bahwa proses kolaborasi tidak hanya dialog dan/atau negosiasi tetapi juga terdapat pengharapan yang timbul dalam suatu komunitas, kepercayaan untuk berperilaku jujur dan kooperatif berdasarkan konsensus dan norma bersama (Fukuyama, 2010; 36)

Menurut Emerson dkk. dan Walker & Hills dalam Orisa (2017) menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan syarat dalam keberlanjutan *collaborative governance* dan memiliki korelasi positif serta signifikan pada proses, *output*, dan *outcome* kolaborasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam membangun dan memberikan kepercayaan menjadikan situasi atau kelompok sangat rentan terhadap

risiko karena berada pada posisi yang terbuka dan bersedia untuk menginvestasikan sumber daya pengetahuan (Klijn et al., 2010) karena kata percaya bermakna menyerahkan sepenuhnya (supaya dijaga/diurus) dan menganggap benar/dapat mencapai satu tujuan yang sama.

Sedangkan, Bryson et al., Chen, dan Sands & Sheridan dalam Aksan (2022) memandang bahwa *trust building* didasari dengan niat baik untuk pertukaran pengetahuan dalam menindaklanjuti kegiatan, sehingga membangun kepercayaan ini seharusnya dapat dilakukan secara dinamis, atas niat baik dan sikap keterbukaan secara bertahap. Pada akhirnya, kepercayaan yang terus dibangun akan membawa pada kemunculan komitmen bersama.

c. *Commitment to Process*

Komitmen merupakan suatu keterikatan yang kuat antara orang atau kelompok dimana didalamnya terdapat tanggung jawab yang harus dikerjakan, yang didasari dari motivasi dan partisipasi antar aktor dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan manifestasi atau hasil yang timbul dari adanya kepercayaan. Komitmen dapat dimaknai sebagai kesediaan dalam mencurahkan waktu dan energi yang dimiliki (Poitras dan Bowen, 2002). Mah dan Hills (2012) menambahkan penekanan dalam komitmen bahwa aspek informasi perlu diiringi pada sikap saling menghormati terhadap pandangan yang berbeda, menjadi bagian penting untuk mewujudkan komitmen interaksi jangka panjang dan pencapaian tujuan bersama dimana kepercayaan dapat dilihat dari sikap saling menghormati kepentingan masing-masing dan ini akan mempengaruhi bentuk komitmen yang ada. Komitmen juga dapat didefinisikan sebagai kepemilikan terhadap proses, sama halnya dengan adanya tanggung jawab bersama.

Ansell dan Gash (2008) menerangkan lebih spesifik dan menyatakan komitmen merupakan fase terpisah dari *face-to-face dialogue* dan *trust building* sebagai tahap ketiga dari proses kolaborasi.

d. *Shared Understanding*

Tahap selanjutnya yang direkomendasikan Ansell dan Gash (2008), yaitu berbagi pemahaman. *Shared understanding* dimaknai sebagai pengembangan pemahaman bersama dalam proses kolaborasi, sehingga setiap pemangku kepentingan harus mengembangkan pemikiran dan memiliki pemahaman mengenai apa yang akan dicapai. Pemahaman bersama ini dapat ditunjukkan dengan adanya upaya untuk mendesain visi bersama (Manring dan Pearsall, 2006) maupun misi bersama (Roussos dan Fawcett, 2000). Selain itu, Prabowo et al. (2021) juga menerjemahkan bahwa pemahaman bersama dapat dipandang sebagai adanya upaya memperjelas aturan dan tujuan yang jelas. Pada konteks ini, pemahaman dapat berupa formalisasi atau kejelasan akan kesepakatan bersama sebagai wujud lanjutan dari hadirnya visi dan misi bersama yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu masalah.

e. *Intermediate Outcome*

Tahap terakhir dalam proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2008) adalah *intermediate outcome*. *Intermediate outcome* dapat dimaknai sebagai sebuah hasil dari kegiatan usaha yang dapat diidentifikasi dan diukur dalam waktu dekat. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa proses kolaborasi akan terjadi jika terdapat kemungkinan dan keuntungan yang cenderung konkret, terdapat kemenangan yang memungkinkan untuk dicapai. Kemenangan kecil (*intermediate outcome*) merupakan hasil sementara dari proses yang sedang berlangsung dalam kolaborasi (Prabowo et al., 2021). Dalam mewujudkan kemenangan kecil, Termeer dan Dewulf (2019) mengemukakan kemenangan kecil perlu ditunjukkan dengan adanya “hasil nyata” ataupun hasil yang terlihat melampaui sebuah ide untuk melaksanakan kegiatan. Atas pandang tersebut, *intermediate outcome* ini akan memberikan umpan balik dalam proses kolaborasi, mendorong siklus, dan membangun kepercayaan serta komitmen.

Pada studi lainnya, Bryson et al. (2015) merevisi beberapa tahap yang dianggap penting sebagai proses kolaborasi. Dengan pertimbangannya melalui beberapa literatur yang berkembang, dikemukakan 5 (lima) tahap diantaranya kepercayaan dan komitmen, pemahaman bersama tentang masalah, mekanisme komunikasi, legitimasi dan perencanaan formal dan darurat.

Berdasarkan beberapa studi yang mempelajari mengenai *collaborative governance* seperti yang sudah diuraikan, menunjukkan bahwa tahapan yang ada secara substansial serta memiliki beberapa asumsi umum yang sama. Pertimbangan dari Ansell dan Gash (2008) sebagai model dasar untuk mendeskripsikan dan menjelaskan proses kolaborasi yang ada di lokasi penelitian, beberapa kesamaan maupun asumsi terkait hal ini dapat dikategorisasikan menjadi 4 (empat) tahap besar dalam proses kolaborasi, yaitu *face-to-face dialogue* sebagai mekanisme komunikasi; membangun kepercayaan dan komitmen; *shared understanding*; dan *intermediate outcome*.

Melalui 4 (empat) tahap ini dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam menjawab permasalahan yang ada, apakah terdapat relevansi dari 4 (empat) tahap acuan tersebut dengan proses kolaborasi dalam penyelesaian masalah persampahan di Kabupaten Temanggung.

2.2.4 Stakeholder

2.2.4.1 Definisi Stakeholder

Banyak sekali ditemukan program atau kebijakan yang tidak terlepas dari kata ‘stakeholder’ (Suharto, 2020: 26-29). Freeman dalam Hayat et al. (2018) mendefinisikan stakeholder sebagai

“Any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization’s objective”

yaitu setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Sama seperti Thompson dalam Chinyio dan Akintoye (2008), bahwa stakeholder merupakan individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dan berpengaruh pada suatu organisasi. Kemudian, kembali ditegaskan oleh Ackermann dan Eden

(2011) bahwa stakeholder merupakan individu atau kelompok yang memiliki kekuatan dalam merundingkan atau mengubah strategi masa depan suatu organisasi.

Secara teoritis dari pandangan di atas, stakeholder merupakan pemangku kepentingan yang meliputi individu atau kelompok dalam suatu organisasi baik profit maupun non-profit yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian atau tujuan dari organisasi bersama. Stakeholder juga merupakan aktor yang saling mempengaruhi dalam organisasi baik itu organisasi internal maupun eksternal serta bentuknya bersifat langsung dan tidak langsung.

Menurut pandangan lainnya, Bryson (2016:60) mendefinisikan stakeholder merujuk pada individu, kelompok, atau organisasi yang dapat mengklaim sumber daya atau hasil serta dipengaruhi oleh hasil itu sendiri. Sementara, Kasali (1994:63) mengungkapkan stakeholder sebagai kelompok-kelompok eksternal dan internal yang memiliki peran dalam menentukan berhasilnya suatu program. Sumarto (2003:15) mempertegas bahwa stakeholder atau pemangku kepentingan merupakan individu, kelompok, atau organisasi yang mempunyai kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (secara positif maupun negatif) pada suatu kegiatan ataupun program pembangunan. Terdapat juga dalam ungkapan Gonsalves et al (Iqbal, 2007) bahwa stakeholder merupakan siapa memberi dampak serta siapa yang terkena dampak dari program, kebijakan, dan aktivitas pembangunan yang dilakukan.

Sederhananya, stakeholder merupakan aktor-aktor yang mencakup individu, komunitas, kelompok sosial-ekonomi, dan/atau lembaga-lembaga publik yang mempunyai kepentingan dan peran dalam sebuah program, diposisikan di dalam (internal) atau di luar (eksternal) untuk mempengaruhi atau dipengaruhi dan mencapai tujuan dari suatu program atau kebijakan pembangunan.

2.2.4.2 Pemetaan Peran Stakeholder

Dalam konteks pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemetaan stakeholder terhadap suatu program atau kebijakan menjadi penting untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai dan program yang dilaksanakan telah selaras dengan peran dan kepentingan setiap pemangku kepentingan. Dalam pemetaan, setiap stakeholder berada pada posisi kritis dan berpengaruh dalam menentukan keberhasilan suatu program atau kebijakan. Pada dasarnya pemangku kepentingan dapat dibagi menjadi tiga kelompok (Crosby, 1991 dalam Kismartini dan Yusuf, 2015):

- a. *Main stakeholders*, yaitu aktor yang secara langsung menerima dampak positif atau negatif (diluar kemauan) dari suatu kegiatan yang dilakukan;
- b. *Supporting stakeholders*, yaitu aktor yang berperan sebagai penengah untuk mendukung proses pelaksanaan kegiatan. Aktor-aktor ini dapat dikategorikan sebagai pemberi dana dan organisasi yang aktif melakukan advokasi terhadap berbagai isu, misalnya organisasi, lembaga masyarakat, atau dunia usaha;
- c. *Key stakeholders*, yaitu aktor yang mempunyai pengaruh kuat dan signifikan terhadap permasalahan, kebutuhan, dan perhatian terkait keberlanjutan kegiatan.

Disamping itu, pada karya Bryson (2003), *What to Do when Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques*, membagi 3 (tiga) jenis stakeholder yang meliputi:

- a. Stakeholder primer, yaitu stakeholder yang secara langsung terpengaruh (baik positif atau negatif) oleh kegiatan atau program yang dilakukan, serta juga dipengaruhi pada tujuan yang ingin dicapai.
- b. Stakeholder sekunder, yaitu stakeholder yang tidak secara langsung terpengaruh (baik positif atau negatif) oleh kegiatan ataupun program yang dilakukan dan atau tujuan yang ingin dicapai.

- c. Stakeholder kunci, yaitu stakeholder yang dapat memberikan pengaruh positif atau negatif pada kegiatan atau program yang dilakukan ataupun tujuan yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini, stakeholder kunci merujuk pada stakeholder yang mempunyai kewenangan legal pada pengambilan keputusan serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan atau program.

Berdasarkan klasifikasi, dapat diketahui bahwa stakeholder memiliki berbagai peran. Nugroho, (2014) dalam bukunya; *Public Policy*, mengemukakan peran stakeholder pada program pembangunan dapat dibagi berdasarkan peranannya, yaitu:

- a. Pembuat kebijakan, yaitu stakeholder yang berperan pada pengambil keputusan serta penentu kebijakan.
- b. Koordinator, yaitu stakeholder yang mempunyai peran dalam mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat.
- c. Fasilitator, yaitu stakeholder yang mempunyai peran dalam memfasilitasi, mendukung dan melengkapi kebutuhan dari kelompok sasaran.
- d. Pelaksana, yaitu stakeholder yang melaksanakan kebijakan, didalamnya termasuk kelompok sasaran.
- e. Akselerator, yaitu stakeholder yang mempunyai peran untuk mempercepat dan memberikan kontribusi guna berjalannya suatu program dengan baik, bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

2.2.5 Konsep Collaborative Governance

Dalam *collaborative governance* dikenal kerangka konsep kolaborasi *pentahelix* yang berkembang dari teori kolaborasi sebelumnya yaitu *triplehelix* dan *quadrahelix*. Konsep kolaborasi *pentahelix* tersebut merupakan konsep kolaborasi dalam menyelenggarakan kebijakan/program/penyelesaian masalah yang melibatkan 5 aktor yaitu pemerintah, entitas bisnis, perguruan tinggi, masyarakat, dan media massa (Hardi, 2020). Berikut tabel yang menjelaskan tentang perkembangan konsep kolaborasi *pentahelix*.

Tabel 2. 2 Perkembangan Konsep Pentahelix

<i>Triplehelix</i>	<i>Quadrahelix</i>	<i>Pentahelix</i>
Pemerintah	Pemerintah	Pemerintah
Bisnis	Bisnis	Bisnis
Akademisi	Akademisi	Akademisi
-	Masyarakat	Masyarakat
-	-	Media Massa

Sumber: Hardi (2020), diolah oleh Penyusun (2024)

Kolaborasi dari lima aktor pemangku kepentingan ini diharapkan dapat mewujudkan yang dirumuskan dan didukung oleh berbagai aktor dengan masing-masing sumber dayanya yang saling berinteraksi secara sinergis. Kutipan Maryono (2024) menyebutkan bahwa *collaborative governance* bertujuan untuk mendukung pengembangan dan peningkatan nilai melalui kolaborasi antarinststitusi seperti pemerintah, swasta, dan LSM. Sesuai dengan yang dimaksud Hardi (2020) dan Sudiana (2020) di dalam kerangka kolaborasi pentahelix tersebut:

- Pemerintah (*Government*)
- Dunia Usaha (*Business*)
- Perguruan Tinggi (*Academic*)
- Kelompok Masyarakat (*Community*)
- Media Massa (*Mass Media*)

2.2.6 Bentuk Collaborative Governance

Collaborative governance merujuk pada mekanisme penyelenggaraan pemerintahan atau kebijakan publik yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan secara kolektif. Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), bentuk *collaborative governance* memiliki karakteristik internal atau prinsip dasar dari suatu sistem kolaboratif yang berhasil, mencakup beberapa elemen struktural dan proses dalam kerangka kerja, dimana *governance* menjadi ruang atau platform bersama bagi aktor dari sektor berbeda untuk berdiskusi, membangun pemahaman bersama, dan menyusun kebijakan atau rencana kerja. Forum ini bersifat inklusif, partisipatif, dan dibentuk secara formal maupun informal (*Collaborative Forum*). Proses

pengambilan keputusan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, tetapi dibahas dan disepakati bersama (*Joint Decision-Making*) oleh aktor berkontribusi terhadap proses dan hasil kolaborasi, baik dalam bentuk keuangan, informasi, tenaga kerja, maupun legitimasi politik dan sosial (*Shared Responsibility and Resources*). Kepercayaan merupakan pondasi utama dalam kolaborasi. Ini dibangun melalui komunikasi terbuka, transparansi informasi, dan kesediaan untuk mendengar pandangan satu sama lain (*Mutual Trust and Understanding*), sehingga kolaborasi dapat bersifat adaptif dan berlangsung secara bertahap, menyesuaikan dengan dinamika lingkungan, kebutuhan aktor, dan kompleksitas masalah yang dihadapi (*Adaptive and Iterative Process*).

Bentuk atau model kolaborasi bisa berbeda-beda dalam praktik tata kelola. Berbagai bentuk kolaborasi memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Pemahaman ini penting untuk menilai efektivitas kerja sama antar aktor dalam tata kelola kebijakan, khususnya dalam pengelolaan persampahan, berikut uraiannya:

Tabel 2. 3 Kelebihan dan Kekurangan Kolaborasi

Bentuk Kolaborasi	Keunggulan	Kelemahan
Koordinasi Antar Instansi	Meminimalkan tumpang tindih kebijakan dan program	Sering masih sektoral dan terbatas pada kesamaan kepentingan
Kemitraan Pemerintah-Swasta	Memungkinkan efisiensi dan inovasi dalam layanan publik	Risiko komersialisasi kepentingan publik, ketimpangan relasi kekuasaan
Kolaborasi Multiactor Formal	Terbangunnya aturan main dan kesepakatan bersama (MoU, regulasi)	Cenderung birokratis dan lambat dalam pengambilan keputusan
Kolaborasi Komunitas (<i>Bottom-up</i>)	Menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat, berbasis lokalitas	Rentan terhadap keberlanjutan karena tergantung pada relawan atau tokoh lokal
<i>Collaborative Governance</i>	Inklusif, adaptif, dan berorientasi solusi jangka panjang lintas sektor	Butuh waktu, sumber daya, dan kepercayaan tinggi antaraktor untuk berhasil

Sumber: Emerson, et al. (2012), Ansell, C., & Gash, A (2008), Bryson, J. M., et al. (2006), O'Flynn, J. (2009), McGuire, M. (2006)

Collaborative governance menjadi alternatif ideal dalam menyelesaikan permasalahan publik yang kompleks, karena mampu menyatukan berbagai aktor dengan sumber daya dan kepentingan berbeda dalam satu kerangka kerja bersama. Pemilihan teori Emerson (2012) dan Rhodes (1996) dalam kajian ini bertujuan untuk menekankan pentingnya proses kolaboratif yang adaptif, lintas sektor, dan berorientasi solusi jangka panjang dalam mendukung tata kelola persampahan yang berkelanjutan di daerah.

2.2.7 Arsitektur Tata Kelola

Menurut Biermann (2009) “*governance architecture*” atau “arsitektur tata kelola” merupakan istilah yang mulai digunakan secara umum untuk mendeskripsikan kompleksitas hubungan kelembagaan maupun stakeholder dalam cakupan yang luas seperti dalam permasalahan keamanan internasional, perekonomian, perdagangan, dan perlindungan lingkungan. Biermann (2010) mengungkapkan bahwa tidak ada kesepakatan dalam definisi dari istilah “arsitektur tata kelola”, namun dalam tulisannya istilah arsitektur tata kelola didefinisikan sebagai sistem yang menyeluruh dari lembaga publik maupun swasta yang terlibat secara aktif dalam suatu area permasalahan. Arsitektur disini dapat diperjelas sebagai meta-level dari sebuah tata kelola.

Istilah *Governance Architectures* juga digunakan kembali oleh Borrás (2014), sebagai sebuah definisi dari strategi dan penataan lembaga secara jangka panjang untuk melaksanakan penyelesaian permasalahan secara holistik atau menyeluruh, memiliki tujuan substantif yang berorientasi pada output, dan melakukan implementasi penyelesaian masalah tersebut dengan mengkombinasikan struktur organisasi lama dengan struktur organisasi yang baru.

Forie (2011) menggunakan istilah *Governance Architecture* atau arsitektur tata kelola untuk mendefinisikan kasus yang lebih kecil yaitu di tingkat pemerintahan lokal. Arsitektur tata kelola digunakan untuk mendefinisikan sebuah *institutional framework* yang mengedepankan desentralisasi, integrasi, inovatif, dan model penyampaian modern yang dinamis dengan menggunakan pendekatan

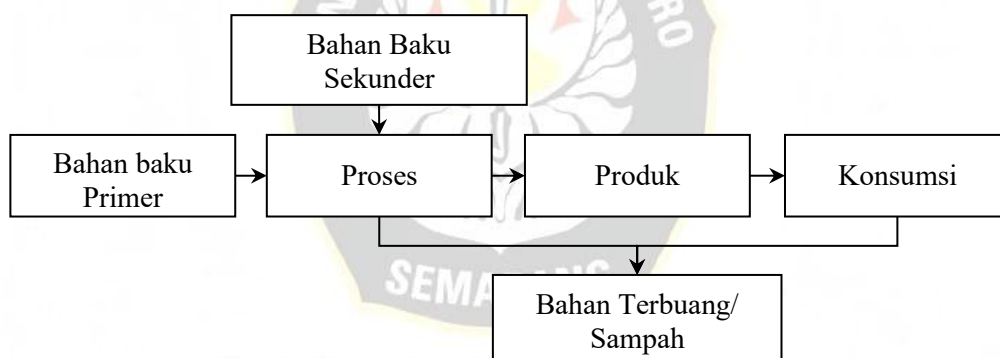
kesamaan visi dan strategi penyampaian, perubahan organisasi, serta kooperasi dan kolaborasi antar pihak-pihak yang berinteraksi.

2.3 Pengelolaan Sampah

2.3.1 Konsep Dasar Pengelolaan Sampah

Sederhananya pengertian sampah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Sampah ataupun limbah padat juga dapat didefinisikan sebagai substansi atau sebuah benda padat yang dibuang ataupun yang hendak akan dibuang oleh pemegangnya. Pemegang yang dimaksud disini bisa jadi adalah produsen dari sampah tersebut, ataupun orang yang ditempati sampah tersebut. (Chalam et al., 2009). Berikut adalah gambaran alur terbentuknya sampah:



Gambar 2. 4 Alur Proses Pembentukan Bahan Terbuang/ Sampah

Sumber: Damanhuri, 2015, diolah oleh Penyusun (2024)

Berbeda dengan yang dinyatakan oleh Dijkema (2000), bahwa apa yang dikategorikan sebagai sampah saat ini bisa menjadi sumber daya di masa depan. Dengan pengertian yang disampaikan oleh Dijkema ini, maka membuka kemungkinan bahwa sampah yang terproduksi dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan/material dasar untuk produksi produk baru lainnya sehingga siklus linear yang saat ini menggambarkan daur hidup sampah akan beralih menjadi siklus sirkuler.

Pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 memiliki definisi yaitu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sedangkan menurut Tchobanoglous dkk. (1993) pengelolaan sampah juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mengontrol timbulan sampah yang dimulai dari sumber hingga pemrosesan akhir di *landfill*.

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah yang dikelola dibedakan menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

2.3.1.1 Sampah Rumah Tangga

Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

2.3.1.2 Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, terdiri atas upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah. Upaya penanganan meliputi upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau

- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Sedangkan upaya pengurangan adalah upaya pengelolaan sampah dimaksudkan untuk membatasi timbulnya jumlah sampah yang nantinya akan dilakukan penanganan sampah dalam pengelolaan sampah yang meliputi upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

2.3.1.3 Sampah Spesifik

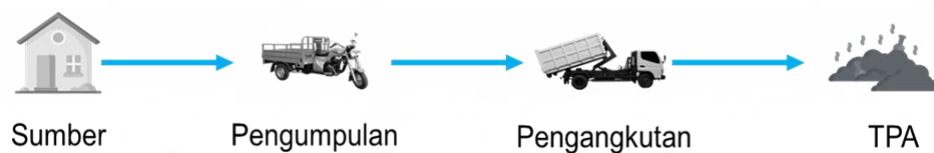
Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

2.3.2 Paradigma Pengelolaan Sampah

Pengolahan sampah secara prinsip terdapat dua paradigma yang secara umum masih banyak digunakan sebagai dasar perencanaan maupun pelaksanaan. Paradigma yang pertama adalah paradigma lama atau yang disebut paradigma tradisional atau konvensional.

2.3.2.1 Paradigma Lama

Paradigma lama pengelolaan sampah juga dapat dikenal dengan pendekatan konvensional dalam artian sistem pengelolaan sampah yang hanya berfokus pada pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan di TPA. Penerapan paradigma ini juga dikenal dengan sistem linear (SYSTEMIQ, 2021).



Gambar 2. 5 Alur Sistem Pengelolaan Sampah dengan Sistem Linear atau Paradigma Lama

Sumber: SYSTEMIQ (2020), diolah oleh Penyusun (2024)

Berdasarkan Seadon (2010), praktik tradisional dalam pengelolaan sampah juga dapat dikonfirmasi pada saat sampah ditempatkan sebagai masalah yang tidak memiliki relevansi dengan proses produksi. Sampah pada paradigma lama hanya akan dilakukan pengelolaan jika sudah terdapat permasalahan yang mengganggu kenyamanan pada saat pembuangan. Pada saat terjadi masalah karena dampak pembuangan sampah seperti pencemaran udara, air, maupun tanah, maka akan mendorong orang untuk melakukan pengelolaan sampah.

Pada paradigma lama ini, volume sampah akan terakumulasi secara menyeluruh di Tempat Pemrosesan Akhir. Hal ini dikarenakan sampah hanya dipindahkan dari sumber-sumber yang tersebar di setiap rumah tangga dan pusat aktivitas lainnya ke Tempat Pemrosesan Akhir. Adapun menurut hasil laporan SYSTEMIQ (2021), sistem ini memiliki kriteria sebagai berikut:

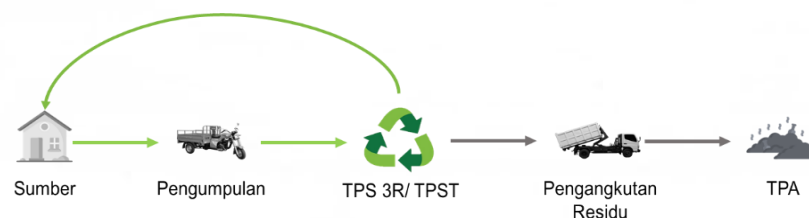
- a. Pola sistem adalah kumpul-angkut-buang;
- b. semua sampah terakumulasi di tempat pemrosesan akhir, sehingga membutuhkan lahan TPA dan biaya operasional yang tinggi;
- c. pembangunan sistem lebih murah dan sederhana tanpa adanya upaya pemanfaatan material sampah;
- d. proses dilakukan dengan cepat karena hanya memindahkan sampah dari sumber ke TPA; dan
- e. belum menerapkan upaya 3R mulai dari sumber hingga pemrosesan akhir.

2.3.2.2 Paradigma Baru

Paradigma yang kedua adalah paradigma baru, dimana paradigma ini lebih berfokus pada usaha 3R sehingga sampah yang diproses di TPA dibuat seminim mungkin. Menurut Fagariba, C.J dan Song (2016) terdapat beberapa ciri paradigma baru pengelolaan sampah yaitu sebagai berikut:

- Melakukan pencegahan timbulnya sampah ataupun mengurangi jumlah sampah yang diproduksi;
- melakukan penggunaan kembali dan mengurangi dampak negatif sampah
- menggunakan kembali material-material yang dapat di daur ulang;
- mendaur ulang, melakukan pengomposan, dan melakukan *recovery* terhadap sampah baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan baku dari sebuah produk baru;
- melakukan *recovery* energi melalui insinerasi, *anaerobic digestion*, ataupun hal sejenis lainnya;
- mengurangi jumlah sampah yang dilakukan pemrosesan akhir di TPA; dan
- melakukan pemrosesan akhir di TPA secara ramah lingkungan.

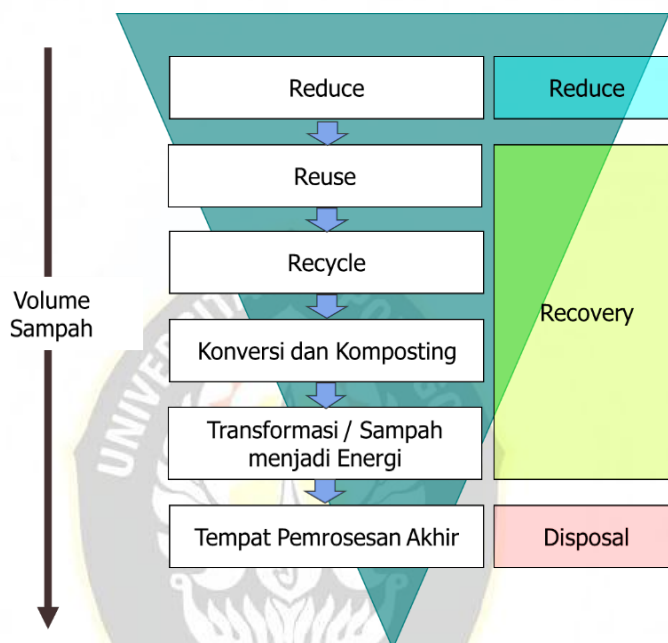
Dalam paradigma baru ini juga merubah cara pandang terhadap sampah, dimana saat ini apa yang dianggap sebagai sampah, bisa menjadi sumber daya/ baku mutu untuk masa depan. Pada akhirnya, pengertian sampah juga dapat berubah yaitu menjadi substansi yang potensinya belum atau tidak dimanfaatkan secara optimal. Paradigma baru ini juga dalam penerapannya dapat disebut dengan sistem sirkuler (SYSTEMIQ, 2021).



Gambar 2. 6 Alur Sistem Pengelolaan Sampah dengan Sistem Sirkuler

Sumber: SYSTEMIQ (2020) Diolah Oleh Penyusun (2024)

Dalam paradigma baru ini, semua proses produksi dan digunakan sebagai upaya transformasi sampah itu sendiri dengan mengembangkan desain sistem produksi yang ada. Sehingga dalam sebuah jejaring proses industry, sampah menjadi salah satu bahan baku (Fagariba, C.J dan Song, 2016).



Gambar 2. 7 Hierarki Sampah berdasarkan Penerapan Paradigma Baru Pengelolaan Sampah

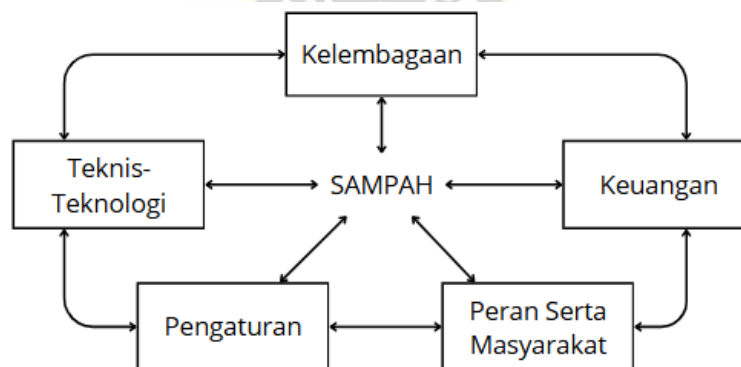
Sumber: Fagariba, C.J., dan Song, S., 2016, diolah oleh Penyusun (2024)

Pada Gambar 2.7 tentang Hierarki Sampah berdasarkan Penerapan Paradigma Baru Pengelolaan Sampah, terlihat dengan jelas perbedaan antara paradigma lama dan paradigma baru berdasarkan perlakuannya terhadap timbulan dan volume sampah. Dua piramida tersebut menggambarkan volume sampah yang dikelola, dimana pada paradigma lama pengelolaan sampah berfokus pada kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan. Jika sampah dalam jumlah besar yang terakumulasi di TPA terus dibiarkan, sampah tersebut akan terus bertambah dan menyebabkan permasalahan yang lebih besar. Sedangkan, pada paradigma baru pengelolaan sampah difokuskan pada pencegahan dan

upaya 3R di tingkat sumber, sehingga sampah yang diproses di TPA menjadi sangat minim.

2.3.3 Aspek Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam sebuah sistem pengelolaan sampah terdapat aspek-aspek yang saling terkait dan mempengaruhi kinerja satu sama lainnya. Terdapat lima aspek yaitu aspek peraturan, aspek keuangan, aspek kelembagaan, aspek peran serta masyarakat, dan aspek teknis-operasional, berikut diagram 5 aspek pengelolaan sampah berikut:



Gambar 2. 8 Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan

Sumber: Dirjen Cipta Karya, KemenPU 2011, diolah oleh Penyusun (2024)

2.4 Pendekatan Metodologi dalam Penelitian Kolaboratif

Pendekatan metodologis dalam penelitian kolaboratif berperan penting dalam memahami dinamika hubungan antar aktor, proses interaksi, serta struktur tata kelola yang terbentuk dalam penyelesaian suatu permasalahan publik. Dalam studi yang mengkaji kolaborasi multi-stakeholder, seperti pengelolaan persampahan di tingkat lokal, metodologi tidak hanya menjadi alat pengumpulan data, tetapi juga sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan keterlibatan aktor, mekanisme dialog, serta efektivitas proses kolaborasi (Ansell dan Gash, 2008).

Penelitian kolaboratif umumnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi studi kasus, karena mampu menggali secara mendalam konteks,

dinamika, dan makna yang dibentuk oleh para aktor dalam interaksinya (Creswell, 2014). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami relasi kekuasaan, proses negosiasi, serta kendala struktural yang muncul dalam tata kelola bersama.

Selain itu, pendekatan pentahelix dalam kolaborasi lintas sektor menuntut pemilihan metode yang mampu menangkap kompleksitas antar aktor. Oleh karena itu, metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan kerap digunakan sebagai perangkat untuk memperoleh data yang holistik (Yin, 2016).

Dengan demikian, pendekatan metodologis dalam penelitian kolaboratif harus mampu menjembatani antara konteks teoritis dengan realitas lapangan. Kajian terhadap metodologi ini menjadi dasar penting dalam menyusun desain penelitian, menentukan teknik pengumpulan data, serta menyusun interpretasi hasil yang relevan dan aplikatif terhadap tujuan penelitian (Patton, 2002). Dalam konteks penelitian sosial dan kebijakan publik, data dibedakan menjadi:

- a. Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari responden atau subjek penelitian melalui interaksi langsung di lapangan. Teknik umum yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD) (Creswell, 2014).
- b. Data Sekunder: Data yang sudah tersedia dan dihimpun dari sumber-sumber resmi atau dokumentasi lain, seperti laporan pemerintah, media massa, arsip regulasi, hasil survei sebelumnya, dan basis data statistik nasional (Yin, 2016).

Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi temuan dari data primer, serta menyusun konteks makro dalam studi kasus yang diangkat.

2.4.1 Data Primer

2.4.1.1 Teknik Pengumpulan Data Primer

Salah satu teknik utama dalam pengumpulan data primer adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Teknik ini digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, serta interpretasi dari informan terhadap

fenomena yang dikaji. Menurut Patton (2002), *in-depth interview* dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain:

1) Indepth Interview

Salah satu teknik utama dalam pengumpulan data primer adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Teknik ini digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, serta interpretasi dari informan terhadap fenomena yang dikaji. Menurut Patton (2002), *in-depth interview* dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain:

a. *Structured Interview*

Pewawancara dapat menggunakan daftar pertanyaan tetap dan seragam untuk semua informan, sehingga cocok untuk studi komparatif dan generalisasi awal (Kvale, 1996)

b. *Semi-Structured Interview*

Pewawancara dapat menggunakan panduan pertanyaan tetapi tetap terbuka terhadap respons dan eksplorasi baru dari informan. Umumnya digunakan dalam studi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor (Creswell, 2014; DiCicco-Bloom dan Crabtree, 2006)

c. *Unstructured Interview*

Tidak ada panduan formal, interaksi berlangsung bebas dan berbasis narasi pengalaman informan. Cocok untuk eksplorasi awal atau memahami pengalaman personal yang kompleks (Fontana dan Frey, 2000)

d. *Non-Probability Purposive*

Informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian (misalnya posisi, pengalaman, keterlibatan langsung) dengan tujuan mendalami pandangan dan pengalaman dari aktor kunci atau ahli yang kompeten (Patton, 2002)

e. *Elite Interview*

Wawancara jenis ini menyoroti individu yang memiliki posisi strategis dalam struktur sosial atau kelembagaan, seperti pejabat

pemerintah, tokoh masyarakat, atau pimpinan organisasi. Pendekatan yang digunakan cenderung semi-terstruktur dan fleksibel, agar mampu mengeksplorasi pandangan, strategi, serta pertimbangan kebijakan dari perspektif para pengambil keputusan (Aberbach dan Rockman, 2002).

f. Snowball Interview

Dilakukan wawancara pada informan pertama, lalu informan tersebut merekomendasikan informan lain, dan proses ini berulang untuk menjangkau jaringan informan yang saling terhubung, terutama jika subjek tergolong tertutup atau tersembunyi (Biernacki dan Waldorf (1981), Noy (2008)

g. Key Person Interview

Wawancara dilakukan pada individu yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman langsung tentang fenomena yang diteliti untuk mendapatkan data yang kaya dan kontekstual dari pihak yang memahami isu secara detail (Marshall, 1996)

2) Observasi

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan metode pengamatan pribadi. Observasi dilakukan dengan mencermati pelaksanaan operasional pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung, khususnya dalam melihat bagaimana proses kolaborasi yang terjadi di lapangan. Mengacu pada Creswell (2019), observasi merupakan pencatatan sistematis terhadap perilaku dan aktivitas individu maupun kelompok dengan tujuan untuk memahami dinamika kolaborasi serta aktivitas yang muncul dari kolaborasi tersebut dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di wilayah penelitian.

2.4.1.2 Fungsi Data Primer

Data primer merupakan sumber utama informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dan memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

- a. Menggali informasi kontekstual yang belum terdokumentasi
Data primer memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam dari pengalaman langsung subjek penelitian, terutama informasi yang tidak tersedia dalam dokumen atau laporan resmi (Creswell, 2014).
- b. Menangkap sudut pandang aktor kunci secara langsung
Melalui wawancara mendalam atau observasi, peneliti dapat memahami makna, persepsi, dan motivasi para aktor dalam proses kolaborasi (Patton, 2002).
- c. Mengidentifikasi isu atau variabel baru yang relevan
Pengumpulan data primer bersifat eksploratif dan terbuka terhadap temuan baru yang muncul selama proses pengumpulan data berlangsung (Lincoln dan Guba, 1985).
- d. Menyesuaikan instrumen dan pendekatan dengan dinamika lokal
Teknik pengumpulan data primer memungkinkan penyesuaian metode berdasarkan konteks sosial dan budaya lokal secara real-time (Creswell, 2014).
- e. Menjadi basis utama untuk validasi temuan sekunder
Data primer digunakan dalam triangulasi untuk menguji keakuratan dan keabsahan informasi dari sumber sekunder (Yin, 2016).

2.4.1.3 Pengambilan Keputusan dalam Penelitian Kualitatif

Pengambilan keputusan metodologis dalam penelitian kualitatif tidak bersifat linear, melainkan adaptif dan berbasis emergent design (Lincoln dan Guba, 1985). Peneliti perlu menyesuaikan strategi berdasarkan dinamika lapangan dan kecocokan antara metode dan tujuan riset.

Beberapa pendekatan pengambilan keputusan yang umum digunakan antara lain:

- a. *Rational Model*: Keputusan dilakukan secara sistematis berdasarkan analisis data dan kriteria yang telah ditetapkan (Simon, 1997)

- b. *Adaptive Decision-Making*: Peneliti melakukan penyesuaian berulang terhadap teknik, lokasi, dan fokus informan berdasarkan pembelajaran lapangan (Stake, 1995)
- c. *Participatory Decision-Making*: Dalam studi kolaboratif, peneliti melibatkan aktor lokal dalam menentukan proses pengumpulan data untuk membangun kepercayaan dan kesetaraan informasi (Cornwall dan Jewkes, 1995)

Pendekatan ini mendukung validitas penelitian dan meningkatkan relevansi sosial dari hasil yang diperoleh.

2.4.2 Data Sekunder

Dalam penelitian kualitatif, data sekunder merupakan sumber informasi yang telah tersedia sebelumnya dan digunakan untuk memperkuat, memverifikasi, atau melengkapi data primer. Data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari institusi atau individu lain (Boslaugh, 2007). Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, atau data-data yang sudah terekam sebelumnya, yang dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan maupun untuk meramalkan (Moleong, 2018:217). Dalam studi kolaborasi tata kelola seperti pengelolaan sampah lintas sektor, data sekunder sangat penting untuk memahami konteks struktural, regulatif, dan historis dari permasalahan.

2.4.2.1 Jenis dan Sumber Data Sekunder

Data sekunder dapat diklasifikasikan (Johnston, 2017; Yin, 2016) ke dalam beberapa jenis berdasarkan sumbernya:

- a. Dokumen Resmi Pemerintah: peraturan daerah, surat edaran, laporan kinerja SKPD, RPJMD, dan berita acara musyawarah.
- b. Data Statistik: data jumlah timbulan sampah, cakupan layanan, jumlah TPS3R dan Bank Sampah, dari BPS, DLH, atau dinas terkait.
- c. Literatur dan Studi Terdahulu: laporan penelitian, skripsi/tesis/disertasi, kajian NGO, atau hasil riset institusi donor.
- d. Media Massa dan Online: artikel berita, dokumentasi media sosial komunitas, dan laporan kegiatan dari stakeholder lokal.

2.4.2.2 Fungsi Data Sekunder

Fungsi utama data sekunder adalah untuk:

- a. Membangun konteks dan kerangka waktu terhadap fenomena.
- b. Dasar triangulasi untuk menguji validitas temuan dari data primer.
- c. Mendukung analisis kebijakan dengan melihat dokumen legal dan keputusan kelembagaan yang mempengaruhi dinamika kolaborasi.
- d. Efisiensi waktu dan biaya karena data sudah tersedia dan dapat langsung digunakan untuk analisis awal.

2.4.2.3 Validasi dan Analisis Data Sekunder

Data sekunder harus diverifikasi dari sisi keandalan sumber (*credibility*), relevansi isi, dan keterbaruan. Yin (2016) menekankan bahwa dalam studi kasus, data sekunder sangat penting karena memperluas dimensi pemahaman peneliti terhadap sistem dan proses yang sedang diteliti.

Proses analisis data sekunder dapat dilakukan melalui:

- a. *Content analysis* terhadap dokumen kebijakan,
- b. *Thematic coding* untuk berita media atau laporan naratif,
- c. Tabulasi dan *trend analysis* untuk data kuantitatif (misalnya statistik jumlah timbulan sampah).

2.4.3 Teknik Analisis Data

2.4.3.1 Analisis Kualitatif

Menurut Moleong (2018) analisis kualitatif merupakan sebuah proses pemilihan dan pengorganisasian data kontekstual sehingga membentuk komponen yang dapat dikelola menjadi sebuah pola data yang dapat dinarasikan menjadi sebuah informasi. Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa pendekatan analisis data, antara lain:

- a. Analisis Deskriptif

Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual fenomena yang diteliti, baik melalui kata-kata, perilaku, maupun dokumen. Tujuannya adalah menyajikan pemahaman

menyeluruh terhadap objek atau peristiwa sebagaimana adanya di lapangan.

b. Analisis Komparatif

Digunakan untuk membandingkan antar kasus, aktor, atau peristiwa guna menemukan persamaan, perbedaan, atau pola hubungan. Metode ini cocok digunakan dalam penelitian yang melibatkan banyak aktor atau lokasi dengan karakteristik yang dapat dibandingkan.

c. Analisis Interaktif atau Model Miles dan Huberman

Metode ini melibatkan tiga tahap utama, yaitu: reduksi data (memilah dan menyederhanakan data penting), penyajian data (display data dalam bentuk matriks, narasi, atau bagan), dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses ini dilakukan secara siklikal dan terus menerus selama dan setelah proses pengumpulan data (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

d. Analisis Tematik

Identifikasi pola atau tema yang muncul dari data kualitatif. Peneliti membaca ulang transkrip wawancara atau catatan lapangan untuk menemukan makna yang berulang atau signifikan dalam konteks tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, digunakan analisis kualitatif deskriptif dan tematik. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menjelaskan secara rinci dan mendalam bagaimana proses kolaborasi dalam tata kelola pengelolaan sampah berlangsung di Kabupaten Temanggung. Melalui identifikasi tema dan narasi dari data yang dikumpulkan, peneliti dapat menggambarkan keterlibatan aktor, dinamika hubungan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses kolaboratif.

2.4.3.2 Analisis Stakeholders

Analisis stakeholder merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami peran aktor yang terlibat dalam kebijakan.

Melalui analisis ini, dapat diketahui sejauh mana pengembangan dilakukan dengan tepat dan sesuai, sehingga keterlibatan aktor dapat dinilai, serta menggambarkan hubungan dan pola jejaring kerja sama antar pihak yang terlibat dalam proses kebijakan tersebut (Salsabila. 2018). Dalam penelitian ini, digunakan metode pemetaan stakeholder dengan pendekatan *Power-Interest Grid (Grids of Power and Interest)* yang dikembangkan oleh Eden dan Ackermann (1998). Metode ini digunakan untuk memetakan posisi aktor berdasarkan dua dimensi utama, yaitu:

- a. Tingkat Kepentingan (*Interest*): Sejauh mana aktor memiliki perhatian dan keterlibatan terhadap isu pengelolaan sampah.
- b. Tingkat Pengaruh (*Power*): Sejauh mana aktor memiliki otoritas, dan sumber daya memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Langkah pertama yang dilakukan untuk menganalisis stakeholder, yaitu menginventarisasi aktor-aktor yang terlibat atau terdampak dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga pendukung lainnya. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi, dilakukan penilaian secara kualitatif terhadap posisi masing-masing aktor yang kemudian diposisikan dalam empat kuadran utama:

- a. *Key players* (tinggi pengaruh – tinggi kepentingan)
- b. *Context setters* (tinggi pengaruh – rendah kepentingan)
- c. *Subjects* (tinggi kepentingan – rendah pengaruh)
- d. *Crowd* (rendah pengaruh – rendah kepentingan)

Akhirnya, pola interaksi antar aktor, bentuk kolaborasi, konflik kepentingan, dan potensi sinergi dalam penyelesaian masalah persampahan dikaji. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai peran dan posisi strategis masing-masing aktor, serta membantu dalam merumuskan strategi peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam tata kelola pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di wilayah eks-Karesidenan Kedu dengan luas wilayah sebesar 87.065 hektar. Kabupaten Temanggung memiliki 20 Kecamatan yang terdiri dari 266 Desa dan 23 Kelurahan. (BPS, 2023)

Secara administratif, Kabupaten Temanggung terletak di wilayah tengah Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lain. Di sebelah utara, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang. Sementara itu, di sisi timur, Temanggung juga berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Di bagian selatan, wilayah ini berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten Magelang, sedangkan di sebelah barat, Kabupaten Temanggung berbatasan dengan wilayahnya sendiri, yang menandakan adanya pembagian wilayah administratif internal di bagian barat.



2.5.2 Kondisi Geografis

Secara astronomis Kabupaten Temanggung terletak antara $110^{\circ}23'$ – $110^{\circ}46'30''$ Bujur Timur dan $07^{\circ}14'$ – $07^{\circ}32'35''$ Lintang Selatan. Letak astronomis biasanya akan berpengaruh terhadap iklim suatu wilayah. Berdasarkan letak astronomisnya Kabupaten Temanggung memiliki iklim tropis (BPS, 2024)

Bentuk Kabupaten Temanggung secara makro merupakan cekungan atau depresi yang artinya rendah di bagian tengah sedangkan sekelilingnya berbentuk pegunungan, bukit atau gunung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, wilayah Kabupaten Temanggung sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian antara 400-1684 mdpl dengan wilayah yang memiliki titik terendah berada pada Kecamatan Bejen sedangkan wilayah yang memiliki titik tertinggi berada pada Kecamatan Wonoboyo.

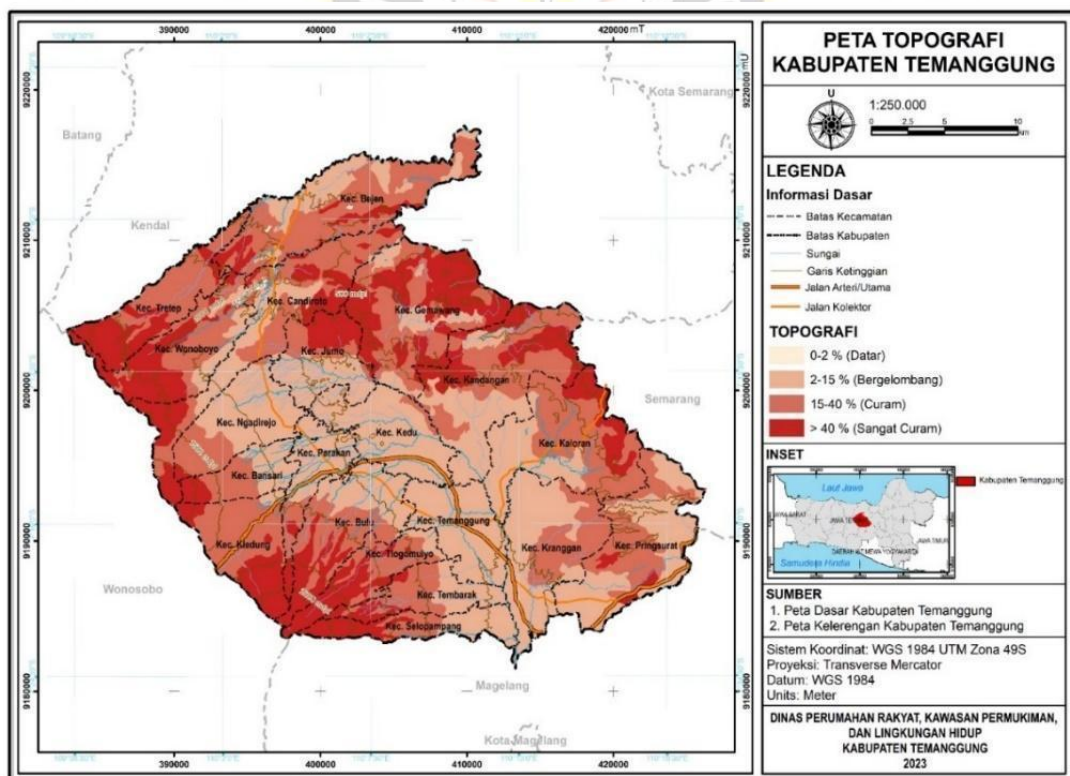
Kondisi topografi suatu wilayah atau kawasan dapat dijadikan sebagai bahan analisa ketinggian suatu kawasan, yang nantinya dipergunakan sebagai acuan dalam menentukan peruntukan kawasan dengan kesesuaian tertentu, dimana kondisi ketinggian topografi merupakan batas aman suatu kawasan untuk kegunaan yang beragam, dimulai dari permukiman, pertanian bahkan untuk pengembangan jalur akses, sekitar Kawasan.

Berdasarkan data kondisi fisik yang dilakukan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis menyebutkan jika kelas ketinggian yang paling luas adalah elevasi antara 500-750 m (38.421 ha atau 43,99%) yang terletak pada bagian tengah dan bagian Utara Timur Laut Kabupaten Temanggung. Wilayah yang mempunyai elevasi rendah 0-500 m (8.538 ha atau 9,77%) yang terletak di Kecamatan Bejen, Gemawang, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kandangan, Kaloran, dan Candiroto. Wilayah dengan elevasi di atas 750 meter, terdapat menyebar pada seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Adapun jenis tanahnya adalah sebagai berikut.

- a. Latosol Cokelat seluas 26.563,47 ha (32,13%) membentang di wilayah Kabupaten Temanggung bagian tengah dari arah Barat Laut ke Tenggara;

- b. Latosol Cokelat Kemerahan seluas 7.879,93 ha (9,53%) membentang sebagian besar di bagian Timur-Tenggara;
- c. Latosol Merah Kekuningan seluas 29.209,08 ha (35,33%) membentang sebagian di sekitar Kali Progo dan lereng-lereng terjal; dan
- d. Andosol seluas 2.149,55 ha (2,60%) membentang di aluvial antar bukit.

Kabupaten Temanggung memiliki topografi yang kompleks dan beraneka ragam sesuai dengan tipikal wilayah yang dikelilingi oleh gunung dan pegunungan. Bentuk topografi wilayah berupa dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0-70 % (datar sampai dengan sangat curam). Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (± 3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (± 3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi pegunungan kecil yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara.



Gambar 2. 10 Peta Topografi Kabupaten Temanggung

Sumber: DPRKPLH, 2023

Klasifikasi kemiringan lahan dibagi menjadi 4 (empat) kelas dan hubungan kelas kemiringan/ lereng dengan luas sebenarnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 4 Kelerengn Lahan Kabupaten Temanggung

No	Kelas Lereng (%)	Luas (ha)	Presentase (%)
1	Datar (0 – 2)	968	1,17 %
2	Bergelombang (2 – 15)	32.492	39,31 %
3	Curam (15 – 40)	31.232	37,88 %
4	Sangat Curam (> 40)	22.373	21,64 %
Jumlah		87.065	100,00 %

Sumber: RPJMD Kabupaten Temanggung, 2018-2023

2.5.3 Kondisi Sosial Masyarakat

2.5.3.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk, migrasi dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi jumlah timbulan sampah di Kabupaten Temanggung. Berikut adalah tabel pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung.

Tabel 2. 5 Data Demografi Kabupaten Temanggung 2023

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan per Km ²
Parakan	2.223	54.158	0,58	6,70%	2.436
Kledung	3.221	28.463	1,03	3,52%	884
Bansari	2.254	24.498	0,79	3,03%	1.087
Bulu	4.304	49.751	0,74	6,15%	1.156
Temanggung	3.339	83.374	0,61	10,43%	2.525
Tlogomulyo	2.484	23.698	0,67	2,93%	954
Tembarak	2.684	32.083	1,00	3,96%	1.193
Selopampang	1.729	23.087	0,88	2,58%	1.207
Kranggan	5.761	50.764	1,19	6,28%	881
Pringsurat	5.727	32.091	0,88	6,63%	936
Kaloran	6.392	46.325	0,69	5,73%	725
Kandangan	7.836	53.403	0,91	6,63%	684
Kedu	3.496	60.499	0,80	7,48%	1.730
Ngadirejo	5.331	57.495	0,86	7,11%	1.079
Jumo	2.932	30.136	0,69	3,76%	1.036
Gemawang	6.711	32.415	0,65	4,22%	509

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan per Km ²
Candiroto	5.994	32.102	0,77	4,10%	553
Bejen	6.884	22.110	0,62	2,72%	320
Tretep	3.365	21.714	0,84	2,69%	645
Wonoboyo	4.398	27.022	0,83	3,34%	614
	87.065	808.446	0,82	100,00%	928

Sumber: Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2024

Selama kurun waktu 2012– 2022 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung rata-rata 0,99%. Pada tahun 2023 kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung mencapai 928 jiwa per km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Temanggung yaitu dengan jumlah populasi 83.374 jiwa sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tretep dengan jumlah populasi 21.714 jiwa. Data luas wilayah, jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk dapat dijadikan sebagai dasar penentuan kebutuhan sarana dan prasarana persampahan bagi masing-masing wilayah untuk saat ini dan pada waktu mendatang (*British Columbia Ministry of Environment, 2016*)

2.5.3.2 Mata Pencaharian

Sesuai dengan kondisi alam Kabupaten Temanggung yang agraris, maka sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian (petani sendiri dan buruh tani) yaitu lebih dari 55% di Tahun 2019. Selain bidang pertanian, mata pencaharian penduduk Kabupaten Temanggung yaitu di bidang perdagangan, jasa, industri, konstruksi, dan lain-lain (RIPS Kabupaten Temanggung, 2023)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi/kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Temanggung pada tahun 2022-2023, ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, bertumbuh yaitu 5,00-5,20% (2020 = -2,13%; 2021 = 3,34%)

Sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Temanggung yaitu sebesar 24,98%, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,32% pada 2023, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya (2021 = 2,00%, 2022 = 1,09%). Berdasarkan angka-angka indeks harga implisit PDRB, dapat diketahui kenaikan harga dari waktu ke waktu baik secara agregat maupun secara sektoral. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Temanggung, 2019-2023 ditunjukkan pada tabel

Tabel 2. 6 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Temanggung (Miliar Rupiah), 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.269,02	3.329,89	3.358,51	3.456,66	3.500,84
2	Pertambangan dan Penggalian	116,31	118,76	126,77	121,77	125,57
3	Industri Pengolahan	3.971,38	3.946,89	4.025,97	4.069,85	4.245,85
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13,7	14,1	14,78	15,56	16,47
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12,74	13	13,73	13,76	14,36
6	Konstruksi	764,99	749,62	806,12	836,12	901,12
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.465,11	3.314,68	3.559,94	3.712,94	3.928,94
8	Pengangkutan dan Pergudangan	771,94	535,84	548,56	907,26	978,95
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	267,28	249,09	264,11	303,84	341,79
10	Informasi dan Komunikasi	332,03	378,99	401,67	410,67	456,87
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	466,12	475,46	491,7	494,23	508,6

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
12	Real Estate	134,95	134,81	137,94	145,94	158,14
13	Jasa Perusahaan	58,37	54,68	56,33	59,51	64,76
14	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	402,52	396,03	395,01	401,33	421,83
15	Jasa Pendidikan	669,62	668,34	671,96	682,91	730,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	178,4	192,13	193,28	198,28	214,78
17	Jasa Lainnya	339,57	318,45	321,56	356,76	388,26
Produk Domestik Regional Bruto		15.214,06	14.890,76	15.387,93	16.187,37	16.997,53

Sumber: Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2024

2.6 Gambaran Pengelolaan Sampah

2.6.1 Timbulan dan Komposisi Sampah

2.6.1.1 Timbulan Sampah

Pada bulan Mei 2023 telah dilakukan survei timbulan sampah yang dilakukan oleh Kementerian PUPR bekerjasama dengan DPRKPLH Kabupaten Temanggung. Kegiatan survei ini dilaksanakan dengan berpedoman pada SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan. Hasil survei timbulan sampah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 7 Rekapitulasi Hasil Survei Timbulan Sampah
Kabupaten Temanggung 2023**

Parameter	Nilai	Satuan
Jumlah penduduk	807.440	Jiwa
Timbulan sampah rata-rata permukiman	0,4	kg/orang/hari
Timbulan sampah permukiman	322.976	kg/hari
Timbulan sampah non permukiman	80.744	kg/hari
Total timbulan sampah	403.720	kg/hari
Timbulan sampah rata-rata total	0,5	kg/orang/hari

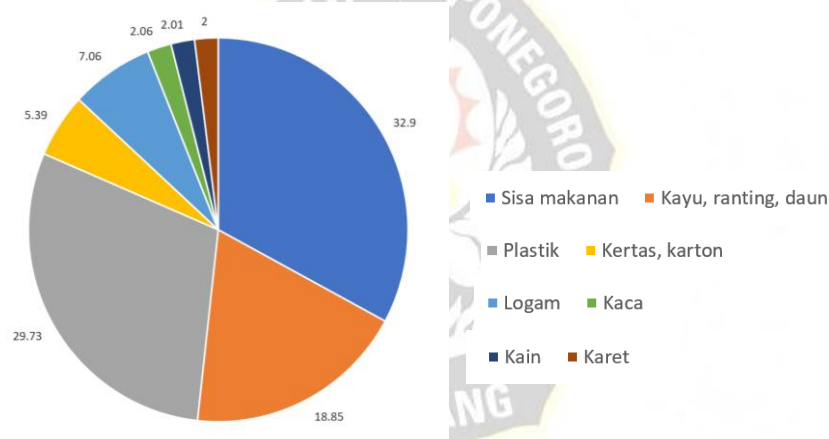
Sumber: Analisa Hasil Survei Timbulan Sampah DPRKPLH, 2023

Berdasarkan data Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Semester 2, jumlah penduduk Kabupaten Temanggung sebanyak 807.440 jiwa.

Timbulan sampah pada permukiman yang dilakukan sampling mendapatkan hasil sebesar 0,4 kg/orang/hari, sehingga didapat timbulan sampah pada permukiman berjumlah 322.976 kg/hari atau 322,98 ton/hari. Sedangkan timbulan sampah non permukiman mendapatkan hasil sebesar 80.744 kg sampah per hari. Jumlah total timbulan sampah di Kabupaten Temanggung adalah 403.720 kg/hari atau 403,72 ton/hari. Dengan demikian, maka timbulan sampah rata-rata total sebesar 0.5 kg/orang/hari.

2.6.1.2 Komposisi Sampah

Berdasarkan timbulan sampah yang telah disurvei, didapatkan karakteristik sampah seperti pada gambar berikut:



Gambar 2. 11 Persentase Komposisi Sampah Kabupaten Temanggung

Sumber: DPRKPLH, 2022

Grafik tersebut menunjukkan bahwa komposisi sampah di Kabupaten Temanggung dengan persentase terbesar adalah sampah organik yang dibagi menjadi sampah sisa makan dan sampah kayu, ranting, daun yaitu sebesar 51,75% dari berat total sampah. Sedangkan sampah anorganik yang terbagi menjadi sampah plastik, kertas dan karton, logam, dll sebesar 38,25% dari total berat sampah.

2.6.2 Program Temanggung Bebas Sampah

Produksi sampah disadari tak bisa serta-merta dihentikan pada masa sekarang. Hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana agar menjamin sampah yang diproduksi tidak mencemari lingkungan. Pencemaran lingkungan oleh

sampah akan mempengaruhi kondisi daya dukung lingkungan sehingga merugikan kelangsungan hidup masyarakat Temanggung dan daerah sekitarnya, baik untuk masa kini maupun masa mendatang. Di sisi lain, masih cukup banyak wilayah di Kabupaten Temanggung yang belum mendapatkan akses pengelolaan sampah. (Dewan Persampahan Kabupaten Temanggung, 2024)

Oleh karena itu, diperlukan pembangunan sebuah sistem pengelolaan sampah yang menyeluruh dan bersifat partisipatif agar segala bentuk pencemaran dan kerusakan dapat dihindari. Gerakan Temanggung Bebas Sampah dibentuk oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam kepemimpinan Bupati Temanggung Periode 2019-2023 H Muhammad Al-Khadziq sebagai upaya untuk mempercepat terbangunnya solusi penyelesaian masalah sampah dengan melibatkan para *stakeholder* dari berbagai sektor, mulai dari pemerintahan; masyarakat; bisnis; media massa; dan akademisi untuk bergotong royong mencapai cita-cita Temanggung bebas sampah.

“Temanggung Bebas Sampah” adalah inisiatif lokal yang bertujuan mewujudkan pengelolaan sampah secara terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Program ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mendukung target nasional pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% pada tahun 2025 (sesuai amanat Perpres No. 97 Tahun 2017).

“Gerakan Temanggung Bebas Sampah adalah upaya gotong-royong antara Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka membangun Solusi permasalahan sampah di Kabupaten Temanggung secara menyeluruh dan terintegrasi. Berfokus pada edukasi untuk menggerakkan masyarakat, dan pembangunan sistem berkelanjutan, gerakan ini berfokus pada menciptakan kondisi masa depan Kabupaten Temanggung yang bebas dari sampah. Gerakan masyarakat untuk menciptakan kultur bijak mengelola sampah melalui edukasi dan dinamisasi yang dilakukan oleh Dewan Persampahan dan komponen peran serta masyarakat lainnya. Sedangkan pendekatan yang kedua adalah pembangunan sistem pengelolaan sampah holistik dan terintegrasi yang dilakukan

oleh Pemerintah Daerah melalui DPRKPLH dan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan.” (Wawancara dengan Darmo Ywanto, 2024)

Menurut DPRKPLH (2024), intervensi yang telah dilakukan oleh Program Temanggung Bebas Sampah dalam aspek pengelolaan sampah yang mencakup 5 dimensi utama:

- a. Aspek teknis, yaitu intervensi pada sisi infrastruktur dan sistem operasional pengelolaan sampah, adalah sebagai berikut :
 - i. Pengembangan TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan TPS Desa.
 - ii. Penyediaan sarana pengangkutan: gerobak motor, *dump truck*, dan kontainer.
 - iii. Pengembangan teknologi pengolahan organik (seperti maggot, kopos, dan pupuk organik) dan anorganik (seperti RDF atau kerjasama daur ulang).
 - iv. Sistem pengangkutan untuk seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.
- b. Aspek regulasi, yaitu intervensi dalam aspek kebijakan dan aturan hukum, adalah sebagai berikut:
 - i. Penetapan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Peran Serta Masyarakat
 - ii. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Desa
 - iii. Arahan untuk penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di tiap desa di Kabupaten Temanggung
 - iv. Integrasi kebijakan pengelolaan sampah dalam RPJMD, KLHS, dan RTRW.
- c. Aspek finansial, yaitu intervensi dalam pembiayaan baik untuk keperluan investasi dan operasional, adalah sebagai berikut :
 - i. Arahan penggunaan dana desa untuk pengelolaan sampah
 - ii. Perbaikan sistem retribusi berbasis jenis layanan dan volume.
 - iii. Insentif retribusi untuk desa dengan kinerja pengurangan sampah.

- iv. Akses pembiayaan *international loan* untuk kepentingan pembangunan TPST tingkat Kabupaten
- d. Aspek kelembagaan, yaitu intervensi pada struktur dan peran kelembagaan, adalah sebagai berikut:
 - i. Pembentukan institusi partisipasi masyarakat seperti Dewan Persampahan, Fasilitator Persampahan Kecamatan (FPK), Fasilitator Persampahan Desa (FPD), dan Pegiat Sampah RT (PSRT).
 - ii. Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat dan BUMDes sebagai kelembagaan pengelola sampah di tingkat desa
 - iii. Kolaborasi multi-aktor: pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, media, sektor bisnis, dan akademisi
- e. Aspek peran serta masyarakat, yaitu intervensi berbasis perubahan perilaku dan partisipasi publik, adalah sebagai berikut:
 - i. Edukasi pengelolaan sampah kepada 12.630 individu masyarakat Temanggung
 - ii. Program pengelolaan sampah di sekolah, pondok pesantren, dan pasar daerah
 - iii. Fasilitasi gerakan sosial seperti Hari Bebas Sampah/ *Clean Up Day*
 - iv. Pelibatan institusi partisipasi masyarakat (Dewan Persampahan, FPK, FPD, dan PSRT) dalam perencanaan seperti kegiatan Musrenbang, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan sampah